

## **Kajian evaluasi manfaat dan kontribusi dana APBN dalam pembangunan peternakan di Jawa Timur**

Eko Nugroho<sup>1</sup>, Suprih Bambang Siswijono<sup>1</sup>, Bambang Ali Nugroho<sup>1</sup>, Hermanto<sup>1</sup>, Priyo Sugeng Winarto<sup>1</sup>, Rizki Prafitri<sup>1</sup>, Ifar Subagiyo<sup>1</sup> dan Susilo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Jl. Veteran Malang 65145 Jawa Timur

[eko\\_nug@ub.ac.id](mailto:eko_nug@ub.ac.id)

---

**ABSTRACT:** The study aimed at analyzing the benefit of the national income and purchasing budget (APBN) in achieving livestock development program in East Java province and analyzing the contribution of APBN in the livestock development program in East Java. The results showed that the contribution of livestock sub-sector to the Product Domestic Regional Bruto (PDRB) of the agricultural sector in East Java province was relatively low (9.20-9.26%) as compared to other sub-sectors. In addition, the contribution of agricultural sector to the total of PDRB in East Java province was 17.44-17.22%. Although its contribution was relatively low, the APBN budget remained important to develop livestock sector in East Java province.

**Keywords:** livestock development, East Java

---

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan sub-sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani asal ternak. Dewasa ini kesadaran masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan protein hewani, khususnya daging sapi semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Sebagai contoh, jumlah konsumsi rata-rata daging sapi di Jawa Timur selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 10,07 persen atau 227.179 ton pada tahun 2001 menjadi 333.516 ton pada tahun 2004 (Direktorat Jenderal Peternakan, 2005).

Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah

(kabupaten/kota) sebagai pelaksana pembangunan di wilayahnya. Provinsi melakukan koordinasi berbagai kegiatan pembangunan lintas kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan, penyusunan standar, kriteria, norma, prosedur, bimbingan serta evaluasi pada aspek kebijakan teknis maupun fungsional.

Seiring dengan adanya perubahan tersebut, Departemen Pertanian sejak tahun 2001 telah merubah paradigma pembangunan sub-sektor peternakan dari povidier (pemberi) menjadi enabler (pemampu) dengan bertindak sebagai fasilitator, akselerator dan regulator. Melalui peran baru ini maka pembangunan peternakan diarahkan untuk menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga terjadi suatu kondisi yang memungkinkan

berkembangnya proses berfikir dan bertindak kreatif pada kelompok sasaran pembangunan. Hal itu antara lain diindikasikan dengan tumbuh dan berkembangnya kelompok tani ternak mandiri serta terwujudnya peran institusi dalam memberikan pelayanan.

Mengacu pada program utama pembangunan peternakan yang dirilis oleh Kementerian Pertanian yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) dan Program Pengembangan Agribisnis (PPA), maka Ditjen Bina Produksi Peternakan telah menetapkan tiga program terobosan yaitu (a) kecukupan daging; (b) mempertahankan swasembada daging dan telur ayam; serta (c) meningkatkan produksi susu dalam negeri. Untuk mengukur kinerja pencapaiannya digunakan tiga indikator utama, yaitu teknis (populasi, produksi dan konsumsi), ekonomi (neraca ekspor impor, investasi, PDB dan lapangan kerja) dan fungsional (on farm, breeding, keswan, kesmavet, puspitnak, pengembangan sistem agribisnis peternakan dan manajemen).

Mengingat kinerja pembangunan peternakan merupakan agregasi dari berbagai sumberdaya (SDM, SDA dan sumberdaya buatan/manajemen dan teknologi), sementara input dari APBN, baik dana konsentrasi maupun dekonsentrasi merupakan bagian yang relatif kecil dari seluruh input pembangunan peternakan maka diperlukan batas ruang lingkup pelaksanaan evaluasi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis secara komprehensif manfaat dana APBN (mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) dalam pencapaian kinerja pembangunan peternakan di Jawa Timur dan 2) menganalisa kontribusi dana APBN dalam pembangunan peternakan di Jawa Timur.

## **MATERI DAN METODE**

### **Penentuan lokasi penelitian**

Penetapan Jawa Timur sebagai lokasi penelitian ditentukan secara *purposive sampling* sesuai petunjuk Singarimbun dan Effendi (1995) yaitu berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain: a) Jawa Timur merupakan lumbung pertanian sekaligus lumbung ternak nasional (Winarso, dkk, 2005); b) komoditas ternak di Jawa Timur sangat bervariasi (sapi potong, sapi perah, kambing/domba, babi, ayam ras/buras, kuda dan itik); c) jumlah dana APBN yang relatif besar pada sub-sektor peternakan di Jawa Timur; serta d) pertumbuhan PDB sub-sektor peternakan di Jawa Timur.

### **Lingkup penelitian**

Dana APBN merupakan salah satu input yang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan peternakan walaupun dana tersebut merupakan bagian yang relatif kecil dari seluruh input pembangunan peternakan. Oleh karena itu, penelitian tentang peran dana APBN terhadap pembangunan peternakan di Jawa Timur secara umum mencakup dua aspek yaitu aspek manajemen dan aspek manfaat.

Aspek manajemen meliputi analisis terhadap pengelolaan dana APBN untuk pembangunan peternakan mulai dari proses penyusunan rencana, mekanisme pelaksanaan pemanfaatan dana, serta monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pemanfaatan dana APBN tersebut. Sedangkan aspek manfaat meliputi analisis terhadap peran dan kontribusi dana APBN terhadap pembangunan peternakan yang ditunjukkan oleh kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub-sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian dan besarnya kontribusi PDRB sektor

pertanian terhadap total PDRB Provinsi Jawa Timur.

### Metode pengumpulan data

Jenis data yang dibutuhkan dalam kegiatan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui dua cara, yaitu: (a) menggunakan metode *Focused Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan stakeholders yang meliputi kelompok sasaran program/proyek, tokoh masyarakat (*key persons*), LSM, Dinas/instansi terkait, koperasi serta sektor swasta, dan (b) wawancara mendalam (*In-depth Interview*) yang dipandu dengan *check-list* terhadap tokoh kunci (*key-persons*) yang dianggap berkompeten dengan pemanfaatan dana APBN untuk pembangunan peternakan di Jawa Timur. Tokoh kunci tersebut antara lain pimpinan proyek, kepala dinas, ketua kelompok sasaran program/proyek, perumus kebijakan, pengusaha dan manajer koperasi.

Penelitian tentang evaluasi program pembangunan peternakan membutuhkan data dan informasi pendukung yang akurat. Oleh karenanya faktor ketersediaan data dan informasi yang akurat merupakan aspek yang paling krusial dalam melakukan suatu evaluasi kebijakan. Data sekunder dikumpulkan langsung dari dokumen laporan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian seluruh program/proyek pembangunan peternakan yang didanai dari APBN, BPS provinsi, kabupaten dan kota, dinas/instansi terkait, universitas/lembaga riset, LSM, koperasi, BUMN/D, sektor swasta serta kelompok sasaran penerima dana bantuan APBN.

### Analisis data

Untuk menjawab manfaat dana APBN terhadap kinerja perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian program/proyek peternakan dilakukan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif melalui analisis hasil kegiatan FGD dan wawancara mendalam. Daniel (1989) mengungkapkan bahwa analisa deskriptif berkaitan dengan kegiatan pencatatan dan peringkasan hasil-hasil pengamatan terhadap kejadian-kejadian atau karakteristik-karakteristik manusia, tempat dan sebagainya secara kuantitatif. Untuk menjawab tujuan kedua, kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menganalisis trend data time series berkaitan dengan kontribusi sub-sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian dan kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Provinsi Jawa Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran umum wilayah penelitian

Wilayah Provinsi Jawa Timur terletak pada 111° - 114°,4' Bujur Timur dan 7,12' - 8,48' Lintang Selatan (BPS Provinsi Jawa Timur, 2009). Luas wilayah Jawa Timur secara keseluruhan adalah 47.156 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 38 kabupaten/kota. Di sebelah utara, Jawa Timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Secara geografis, lokasi Provinsi Jawa Timur terletak di sekitar garis Khatulistiwa sehingga mengalami perubahan iklim sebanyak dua kali setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara bulan Oktober - April. Sedangkan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Januari - April. Mendung paling banyak terjadi pada bulan Desember - Februari dengan rata-

rata lama penyinaran matahari 40-53 persen. Secara umum temperatur tertinggi ( $33,4^{\circ}\text{C}$ ) terjadi pada bulan November dan terendah ( $13,6^{\circ}\text{C}$ ) pada bulan Agustus dengan suhu kelembaban rata-rata berkisar antara 31-98%.

Tata guna lahan di Jawa Timur dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu tanah sawah dan tanah non-sawah. Data BPS Provinsi Jawa Timur (2003) menunjukkan bahwa penggunaan tanah sawah menurut jenis pengairannya terdiri dari 58,1% sawah pengairan teknis, 10,1% pengairan setengah teknis, 10,6% pengairan sederhana, 20,8% sawah tadah hujan, 0,01% lahan pengairan pasang surut dan 0,2% pengairan lainnya. Sedangkan tanah non-sawah terdiri dari pekarangan tanah untuk bangunan dan halaman, tegalan/kebun/huma, padang rumput, tambak, dan kolam.

Data populasi penduduk Jawa Timur berdasarkan Hasil Proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2005 sebesar 37.469,70 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,75% selama kurun waktu 2000-2010 (BPS, 2010). Laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur tersebut jauh lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan penduduk nasional selama tahun 2000-2010 yakni sebesar 1,33%. Menurut data yang dikeluarkan oleh kantor BPS Provinsi Jawa Timur (2009), Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak dengan kepadatan penduduk tertinggi ( $8.059 \text{ jiwa/Km}^2$ ), diikuti oleh Kota Malang ( $7.420 \text{ jiwa/Km}^2$ ) dan Kota Mojokerto ( $6.877 \text{ jiwa/Km}^2$ ). Kepadatan penduduk di ketiga kota tersebut jauh melebihi kepadatan rata-rata penduduk di Jawa Timur yang sebesar  $799 \text{ jiwa/Km}^2$  pada tahun 2008.

## **Manfaat dan kontribusi dana APBN dalam pembangunan peternakan di Jawa Timur**

### **Aspek Manajemen**

Dalam aspek manajemen, analisis terhadap pengelolaan dana APBN untuk pembangunan peternakan di Jawa Timur dijelaskan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan dana, serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana APBN.

#### **(1) Perencanaan**

Secara makro yang menjadi kekuatan dari sisi perencanaan pengelolaan dana APBN adalah dalam hal improvisasi, dimana daerah leluasa melakukan improvisasi dalam penyusunan perencanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Hal ini dapat diketahui dari peranan alokasi dana APBN untuk menyusun perencanaan (*planning*) program pembangunan peternakan. Proses perencanaan pemanfaatan dana APBN untuk pembangunan peternakan dimulai dari penetapan kelompok sasaran yang dilakukan dengan membentuk tim teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Penetapan kelompok sasaran ini mengacu pada beberapa arahan kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Beberapa kriteria yang digunakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan kelompok sasaran adalah dengan mendasarkan pada skala usaha, jenis usaha yang mengarah pada pengembangan sumber daya lokal, kontinuitas usaha dan prospek usaha kelompok sasaran. Dengan demikian, kelompok sasaran terpilih adalah kelompok sasaran yang memiliki usaha yang telah berjalan dengan baik dan memiliki prospek yang bagus.

Namun, penetapan kelompok sasaran hanya dilakukan berdasarkan data yang diberikan oleh Kepala Desa atau Camat dan tidak ditunjang dengan survey atau peninjauan secara langsung kondisi di lapang. Akibatnya penetapan kelompok sasaran belum tentu tepat sasaran karena data yang diberikan tidak dibuktikan keakuratannya. Di samping itu, adanya pelaksanaan survey lapang terhadap calon kelompok tani yang akan diberikan dana bantuan diharapkan bisa memberikan informasi akurat mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok. Dengan demikian kegiatan yang direncanakan bukan hanya pemberian bantuan dana akan tetapi sudah menyangkut solusi permasalahan secara keseluruhan dan yang lebih penting lagi diharapkan bantuan dana APBN tersebut bisa tepat sasaran.

Perencanaan berikutnya adalah melakukan penyusunan rencana kegiatan pemanfaatan dana APBN oleh kelompok sasaran terpilih untuk diajukan kepada pengelola bantuan dana APBN yang dalam hal ini adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Apabila usulan dari masing-masing kelompok sasaran diterima, maka masing-masing kelompok sasaran akan menerima dana bantuan APBN tersebut dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan rencana kegiatan ini adalah terbatasnya kemampuan kelompok sasaran dalam membuat rencana bisnis, sehingga rencana yang dibuat sering tidak memperhitungkan faktor resiko dimana dalam usaha peternakan resiko kegagalan yang diakibatkan oleh faktor alam sulit untuk dihindari, misalnya wabah penyakit. Akibatnya rencana yang disusun belum tentu mencerminkan kondisi dan prospek usaha yang sesungguhnya.

## **(2) Pelaksanaan**

Dana APBN yang diterima oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dari pusat dialokasikan kepada beberapa kelompok peternak terpilih untuk digulirkan diantara masing-masing anggota kelompok peternak dengan hak pengelolaan sepenuhnya oleh kelompok peternak. Beberapa hal yang ditetapkan oleh masing-masing kelompok peternak dalam pengelolaan perguliran dana adalah mengenai penetapan anggota kelompok yang memperoleh perguliran, jangka waktu pengembalian dana, jumlah angsuran, bunga pinjaman, pemberian sanksi dan pola perguliran dana yang telah disepakati oleh masing-masing anggota kelompok.

Pelaksanaan perguliran dana APBN di Provinsi Jawa Timur mengalami hambatan dalam pengembalian angsuran kredit karena sebagian dari dana APBN yang digulirkan tidak dapat dikembalikan oleh anggotanya. Hal ini disebabkan kurang tepatnya penetapan kelompok sasaran sehingga terdapat kelompok sasaran yang sebenarnya belum layak untuk mendapatkan kredit. Kendala lain yang dihadapi adalah masih terbatasnya kemampuan teknis kelompok sasaran dalam berusaha sehingga produk yang dihasilkan sulit bersaing di pasar.

Bantuan dana APBN yang diterima oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak dialokasikan sepenuhnya kepada kelompok peternak, namun sebagian dialokasikan untuk kegiatan administrasi proyek dan penyusunan rencana teknis (lihat Tabel 1). Sebagai contoh, dana APBN untuk pembangunan peternakan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2001 sebagian besar (62,92%) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan usaha peternakan dan terus meningkat menjadi 91,61% pada tahun 2002. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas Peternakan

Provinsi Jawa Timur selalu berupaya untuk meningkatkan alokasi dananya untuk pengembangan peternakan. Kegiatan-kegiatan pengembangan peternakan tersebut meliputi pengadaan kendaraan untuk mobilitas petugas/aparat dinas dalam mengelola dana APBN, pengadaan sarana produksi (saprodi), diklat teknis fungsional, pengembangan usaha tani, serta monitoring dan evaluasi. Namun, jika

dikaji dari besarnya alokasi dana untuk kegiatan non pengembangan yang berupa kegiatan administrasi proyek dan penyusunan rencana teknis diketahui bahwa pada tahun 2001 jumlahnya cukup besar yaitu sebesar 37,07% dan menurun tajam menjadi 8,39% pada tahun 2002. Sedangkan pada tahun 2000 tidak terdapat alokasi dana untuk administrasi proyek dan penyusunan rencana teknis.

Tabel 1. Proyek pembinaan saprodi peternakan di Provinsi Jawa Timur (000)

No	TH	A	B		%	C	D	E	F	G	H		%	Total
1	00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
2	01	79,531	31,680	111,211	0.37	0	0	0	3,150	168,299	17,340	88,789	0.63	300,000
3	02	61,062	73,138	134,200	0.08	25,000	175,000	110,000	0	1,337,100	18,700	1,465,800	0.92	1,600,000

Keterangan :

TH = Tahun

00 = 2000

01 = 2001

02 = 2002

A = Administrasi proyek

B = Penyusunan rencana teknis

= Jumlah

C = Pengadaan kendaraan roda dua

D = Pengadaan kendaraan roda empat

E = Pengadaan sarana produksi

F = Diklat teknis fungsional

G = Pengembangan usaha tani

H = Monitoring dan evaluasi

Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut dapat dikatakan bahwa alokasi dana untuk kegiatan di luar pengembangan usaha peternakan sangat besar walaupun pada tahun 2000 tidak ada alokasi dana dan pada tahun 2002 menurun cukup tajam. Hal ini mengakibatkan dana sebesar itu menjadi tidak produktif karena apabila sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk pengembangan usaha peternakan maka dana tersebut akan dapat berkembang. Alokasi dana untuk kegiatan pembinaan yang seharusnya ada pada kenyataannya tidak dialokasikan, sehingga kelompok peternak yang memperoleh bantuan dana APBN tidak mendapatkan kegiatan pembinaan secara kontinyu.

### (3) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan cara meminta laporan kelancaran pembayaran angsuran, perguliran dana diantara anggota kelompok dan perkembangan usaha secara periodik dari masing-masing anggota kelompok yang memperoleh guliran dana. Selanjutnya laporan dari masing-masing anggota kelompok peternak tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha masing-masing anggota kelompok peternak tersebut. Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh kelompok sasaran dalam pembuatan laporan, maka laporan perkembangan usaha dan perkembangan jumlah dana tidak dapat

diberikan secara kontinyu. Akibat dari kondisi ini Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sering tidak dapat segera mengetahui perkembangan usaha kelompok sasaran dan apabila terdapat masalah pada kelompok sasaran tersebut, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak dapat dengan segera mengetahuinya. Mengingat alokasi dana untuk kegiatan monitoring dan evaluasi tersedia maka seharusnya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dapat melakukan monitoring ke lokasi kelompok secara periodik.

Disamping itu, pelaksanaan evaluasi dengan hanya mengandalkan pada laporan kelompok sasaran mengakibatkan hasil evaluasi masih diragukan kebenarannya karena tidak ditunjang dengan survey ke lokasi kelompok sasaran. Di sisi lain, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan yang jelas terhadap keberlanjutan dari program bantuan dana APBN tersebut karena petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) masih belum jelas sehingga fungsi monitoring dan evaluasi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menjadi tidak jelas. Kendala ini mengakibatkan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sulit

untuk menindaklanjuti program tersebut.

### **Aspek Manfaat**

Aspek manfaat dana APBN untuk pembangunan peternakan di Jawa Timur dapat ditunjukkan oleh kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub-sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian di Jawa Timur dan besarnya kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB Provinsi Jawa Timur.

#### **a. Kontribusi sub-sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian di Jawa Timur**

Secara makro keberhasilan pembangunan peternakan dapat ditunjukkan oleh kontribusi sub-sektor peternakan terhadap sektor pertanian. Sebagai contoh, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa sub-sektor peternakan selama periode 2001-2002 memberikan kontribusi sebesar 9,20% pada tahun 2001 dan sebesar 9,26% pada tahun 2002 terhadap PDRB sektor pertanian di Jawa Timur atau berada pada urutan ketiga setelah sub-sektor bahan makanan dan perkebunan (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian di Jawa Timur

No	Lapangan Usaha	2001	2002	Kontribusi (%)	
				2001	2002
1	Pertanian	10.246.976,92	10.461.874,85	100,00	100,00
	a. Tanaman pangan	6.757.159,71	6.829.213,02	65,94	65,28
	b. Tanaman perkebunan	1.552.421,02	1.602.798,04	15,15	15,32
	c. Peternakan dan hasilnya	942.742,05	968.272,58	9,20	9,26
	d. Kehutanan	238.560,81	241.364,45	2,33	2,31
	e. Perikanan	756.093,33	820.226,45	7,38	7,84

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2003

Kecilnya kontribusi sub-sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian di Jawa Timur berkaitan erat

dengan rendahnya kinerja usaha peternakan. Sebagai perumpamaan, pada umumnya usaha peternakan sapi

potong adalah usaha peternakan rakyat yang dikelola oleh mayoritas rumah tangga perdesaan dengan skala kepemilikan rata-rata 2-4 ekor. Data statistik peternakan menyebutkan bahwa lebih kurang 10,5 juta ekor sapi potong dipelihara oleh sekitar 4 juta rumah tangga peternak (Direktorat Jenderal Peternakan, 2010). Ciri-ciri usaha peternakan rakyat antara lain tingkat pendidikan peternak rendah, pendapatan rendah, penerapan manajemen dan teknologi konvensional, lokasi ternak menyebar luas, skala usaha relatif kecil, serta pengadaan input utama yakni hijauan makanan ternak (HMT) masih tergantung pada

musim, tenaga kerja keluarga, penguasaan lahan HMT terbatas, produksi butir-butiran terbatas, dan sebagian tergantung pada impor (Yusdja, dkk, 2007).

**b. Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2001-2002 sebesar 17,44% pada tahun 2001 dan sebesar 17,22% pada tahun 2002 (Tabel 3).

Tabel 3. Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Provinsi Jawa Timur

No	Lapangan Usaha	2001	2002	Kontribusi (%)	
				2001	2002
1	Pertanian	10.246.976,92	10.461.874,85	17,44	17,22
	a. Tanaman pangan	6.757.159,71	68.29.213,02	11,50	11,24
	b. Tanaman perkebunan	1.552.421,02	1.602.798,04	2,64	2,64
	c. Peternakan dan hasilnya	942.742,05	968.272,58	1,60	1,59
	d. Kehutanan	238.560,81	241.364,45	0,41	0,40
	e. Perikanan	756.093,33	820.226,45	1,29	1,35
2	Pertambangan dan Penggalian	1.136.381,98	1.176.352,64	1,93	1,94
3	Industri Pengolahan	15.597.265,77	1.533.5942,61	26,55	25,24
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1.594.202,10	1.710.559,78	2,71	2,82
5	Bangunan	2.631.188,42	2.657.360,8	4,48	4,37
6	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	12.871.766,9	13.805.154,89	21,91	22,72
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4.792.517,95	5.327.307,91	8,16	8,77
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.308.586,36	3.522.598,67	5,63	5,80
9	Jasa-jasa	6.501.293,81	6.756.904,05	11,07	11,12
PDRB Jawa Timur		58.750.180,20	60.754.056,10	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2003

Dari persentase tersebut, sumbangan dari sub-sektor peternakan masing-masing sebesar 1,60% dan sebesar 1,59%. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur tersebut berada pada urutan ketiga setelah sektor industri

pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kecilnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur sejalan dengan kecilnya sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB nasional. Data yang dikeluarkan oleh BPS (2008) menyebutkan bahwa



sektor pertanian bersama-sama dengan peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan kontributor ketiga terbesar (14 persen) *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia setelah sektor industri manufaktur (27,4%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (17,26%). Meskipun kontribusinya relatif kecil, sektor pertanian termasuk sub-sektor peternakan didalamnya tetap menjadi sektor yang vital bagi masyarakat Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja terbesar (41,24%) dibandingkan dua sektor lainnya yang memiliki kontribusi lebih besar terhadap GDP Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pada tahap perencanaan, pemanfaatan dana APBN diperuntukkan untuk membentuk tim teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk menetapkan kelompok sasaran terpilih.
2. Pada tahap pelaksanaan, pemanfaatan dana APBN dialokasikan kepada beberapa kelompok sasaran terpilih yang digulirkan diantara anggota kelompoknya.
3. Pada tahap monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana APBN, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur hanya mengandalkan pada laporan kelompok sasaran terpilih.
4. Kontribusi sub-sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur secara umum relatif masih kecil (9,20-9,26%) bila dibandingkan dengan kontribusi sub-sektor lainnya (tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap total

PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 17,44-17,22%.

### Saran

1. Meskipun kontribusi dana APBN terhadap pembangunan peternakan relatif kecil, namun jika dilihat dari manfaat yang diberikan sangat penting. Untuk itu keberadaan alokasi dana APBN dalam pembangunan peternakan masih tetap dibutuhkan oleh daerah.
2. Guna lebih meningkatkan peranan dana APBN dalam pembangunan peternakan maka berbagai kendala yang ditemukan pada tataran perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perlu segera diatasi melalui program peningkatan kualitas sumberdaya manusia, program pengembangan sistem jaringan informasi yang mudah diakses stakeholder peternakan, program peningkatan partisipasi masyarakat peternak dan swasta dalam pengembangan peternakan yang berbasis potensi lokal, program pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2008. Trends of the selected socio-economic indicators of Indonesia (March 2008). Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010. Laporan bulanan data sosial ekonomi edisi 3 Agustus 2010. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2003. Jawa Timur dalam angka 2003. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2009. Jawa Timur dalam

- angka 2009. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Daniel, W. W. 1989. Statistik nonparametrik terapan. PT. Gramedia Jakarta.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2005. Statistik peternakan nasional. Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2010. Pedoman pelaksanaan penyelamatan sapi betina produktif tahun 2010. Direktorat Jenderal Peternakan – Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- Singarimbun, M. dan Efendi, S., 1995. Metode Penelitian survey. LP3ES. Jakarta.
- Winarso, B., Rosmiyati, S., Chaerul, M. 2005. Tinjauan ekonomi ternak sapi potong di Jawa Timur. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 23 No. 1, Juli 2005: 61-71.
- Yusdja, Y., Rosmijati, S., Sri, W., Wahyuning, K. S., Ikin, S., Nyak, I., Yulia, F. S. 2007. Pembangunan peternakan: Pencapaian dan prospek. Dalam Prosiding Kinerja dan prospek pembangunan Pertanian Indonesia. Editor: Kedi Suradisastra, Yusmichad Yusdja and Prajogo U. Hadi. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.